



**LAPORAN
KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK BIDANG PARIWISATA
KOMISI X DPR RI
KE POLTEKPAR PALEMBANG PROVINSI SUMATERA SELATAN
MASA PERSIDANGAN V TAHUN SIDANG 2022—2023
TANGGAL 22 S.D. 24 JUNI 2023**

I. PENDAHULUAN

A. Dasar Kunjungan Kerja

1. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, Pasal 98 ayat (3) huruf a dan huruf d.
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata.
3. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan.
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif.
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Desa.
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.
8. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang BUMN.
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya.
10. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.
11. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Lingkungan Hidup.
13. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam.
14. Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib.
15. Keputusan Rapat Intern Komisi X DPR RI tanggal 16 Mei 2023 tentang keputusan melakukan kunjungan kerja spesifik Bidang Pariwisata ke Poltekpar Palembang, Poltekpar Lombok, dan Universitas Ciputra Surabaya.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud Kunjungan Kerja Spesifik Bidang Pariwisata Komisi X DPR RI pada Masa Persidangan V Tahun Sidang 2022--2023 adalah untuk melaksanakan fungsi pengawasan, serta mendapatkan data-data faktual dan penjelasan secara langsung dari pejabat daerah Provinsi Sumatera Selatan dan jajaran Poltekpar Palembang terkait penyelenggaraan pendidikan, SDM, dan riset bidang pariwisata yang diselenggarakan oleh Poltekpar Palembang. Adapun tujuannya adalah untuk melakukan komunikasi intens, mendapatkan data faktual, menggali dan menyerap aspirasi dari pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan bidang pariwisata olahraga di Provinsi Sumatera Selatan dan Poltekpar Palembang, terkait dengan penyelenggaraan pendidikan, SDM, dan riset bidang pariwisata yang diselenggarakan oleh Poltekpar Palembang.

C. Agenda Kunjungan Kerja

Agenda kunjungan kerja spesifik Komisi X DPR RI ke Poltekpar Palembang yaitu melakukan pertemuan dengan:

1. Direktur Politeknik Pariwisata Palembang beserta jajaran.
2. Dosen dan perwakilan mahasiswa Politeknik Pariwisata Palembang.
3. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan.
4. Badan Promosi Pariwisata Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
5. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Palembang .
6. Organisasi Kepariwisataaan di Provinsi Sumatera Selatan:
 - a. Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI).
 - b. Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia (ASITA).
 - c. Gabungan Pengusaha Wisata Bahari dan Tirta (GAHAWISTRI).
 - d. Asosiasi Kawasan Pariwisata Indonesia (AKPI).
 - e. Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI).
 - f. Masyarakat Pariwisata Indonesia (MPI).
 - g. Hotel Human Resources Managers Association (HHRMA)
 - h. Himpunan Penulis Pariwisata (HPP).
 - i. Generasi Pesona Indonesia (GenPI).
7. KADIN Provinsi Sumatera Selatan.
8. KADIN Kota Palembang
9. Pemangku kepentingan lainnya di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif.

D. Tim Kunjungan Kerja

Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi X DPR RI ke Poltekpar Palembang yaitu dipimpin oleh Anggota Komisi X DPR RI dr. Sofyan Tan dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Tim didampingi oleh Sekretariat dan Tenaga Ahli Komisi X DPR RI, Tim Pemberitaan Sekretariat Jenderal DPR RI. Adapun pendamping dari mitra kerja yaitu pejabat dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI, Fadjar Hutomo, S.T., MMT., CFP selaku Staf Ahli Bidang Manajemen Krisis, dan Faisal, A.Md.Par., S.ST.Par., M.M. selaku Kepala Pusat Pengembangan SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

II. ISI LAPORAN

A. Identifikasi Data dan Informasi Penyelenggaraan

1. Dukungan Pemerintah dan Pemerintah Daerah Untuk Poltekpar Palembang

Dukungan dari Pemerintah dalam penyelenggaraan pendidikan kepariwisataan di Poltekpar Palembang mencakup anggaran untuk penyelenggaraan pendidikan serta anggaran operasional, pembangunan fisik dan peralatan, investasi dengan pemangku yang terkait, serta penyelesaian lahan untuk pembangunan kampus berkelanjutan. Adapun dukungan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pendidikan kepariwisataan di Poltekpar Palembang ialah keterlibatan Pemda dalam memformulasikan program kegiatan baik pengembangan SDM dan kelembagaan, SDM usaha pariwisata, yang dapat menjadi studi kasus bagi Poltekpar Palembang sesuai dengan tridarma perguruan yakni pengabdian, penelitian, dan pendidikan.

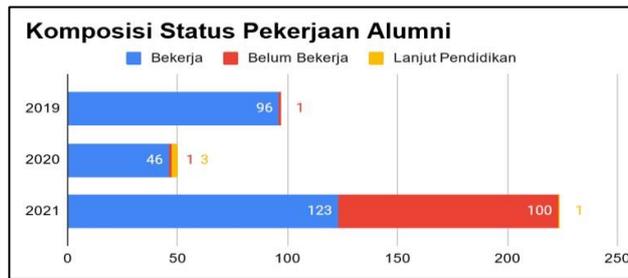
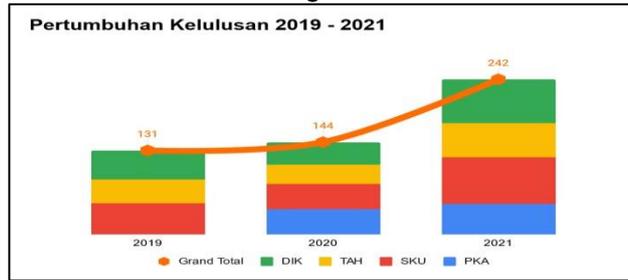
2. Kolaborasi Poltekpar Palembang bersama Pemprov Sumatera Selatan dan Pemangku Pariwisata

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menilai kolaborasi dan kerjasama pendidikan dan peningkatan SDM pelaku pariwisata dengan Poltekpar berjalan dengan baik. Bentuk kolaborasi dalam peningkatan SDM, pendidikan dan riset dilakukan dengan melibatkan Poltekpar Palembang baik dosen maupun mahasiswa ke dalam kegiatan-kegiatan yang sifatnya non teknis seperti pelatihan, workshop, peningkatan kompetensi aparatur kabupaten/kota serta event-event sebagai studi tiru dan bentuk keterlibatan mahasiswa dalam manajemen event, penyambutan acara/hospitality, dukungan bantuan food truck, kuliner, dan divisi lainnya.. Kerja sama lain juga dilakukan bersama organisasi pariwisata, akademisi serta pihak swasta dalam peningkatan SDM, pendidikan, riset, pembangunan serta pengembangan kawasan destinasi wisata melalui sebuah lembaga teknis pariwisata.

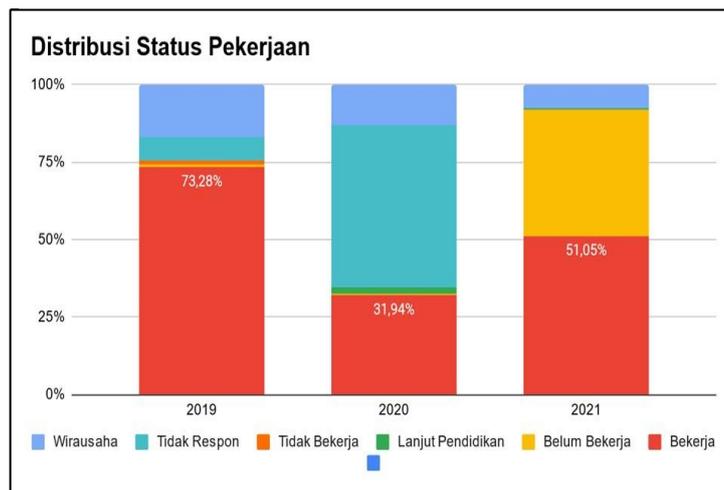
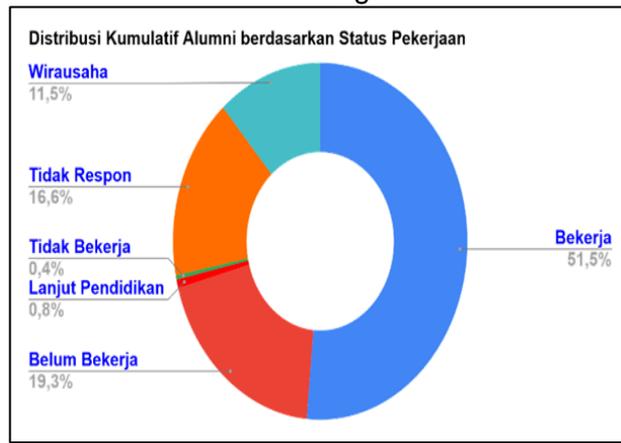
3. Kondisi Penyelenggaraan Pendidikan Kepariwisata di Poltekpar Palembang

Berdasarkan Jumlah dosen/tenaga pengajar tetap yang ada di Poltekpar Palembang pada tahun akademik 2021/2022 adalah 35 orang dan jumlah mahasiswa 812 (1 : 23). Pendidikan terakhir dosen/tenaga pengajar adalah doktor sebanyak 10 orang (5 di antaranya sedang mengikuti pendidikan) dan sebanyak 25 orang magister. Jabatan akademik para dosen antara lain 4 Lektor Kepala, 6 Lektor, 17 Asisten Ahli, dan 8 tenaga pengajar. Hal yang masih menjadi permasalahan pokok dalam penyelenggaraan pendidikan di Poltekpar Palembang ialah terkait sumber daya manusia tenaga pengajar di Poltekpar Palembang yaitu masih terbatasnya jumlah dosen/tenaga pengajar vokasional pada program studi bila dibandingkan dengan tenaga pengajar bidang umum dan jumlah mahasiswa yang ada. Hal ini dipengaruhi juga oleh jumlah pengadaan formasi pegawai belum dapat dipenuhi sesuai kebutuhan. Jumlah lulusan Poltekpar Palembang tiap tahun terus mengalami peningkatan, pada tahun 2019 berjumlah 131, pada tahun 2020 berjumlah 144 dan pada tahun 2021 berjumlah 242 (lihat bagan 1). Adapun distribusi lulusan berdasarkan status pekerjaan, tempat bekerja lulusan Poltekpar Palembang dapat dilihat di dalam bagan berikut.

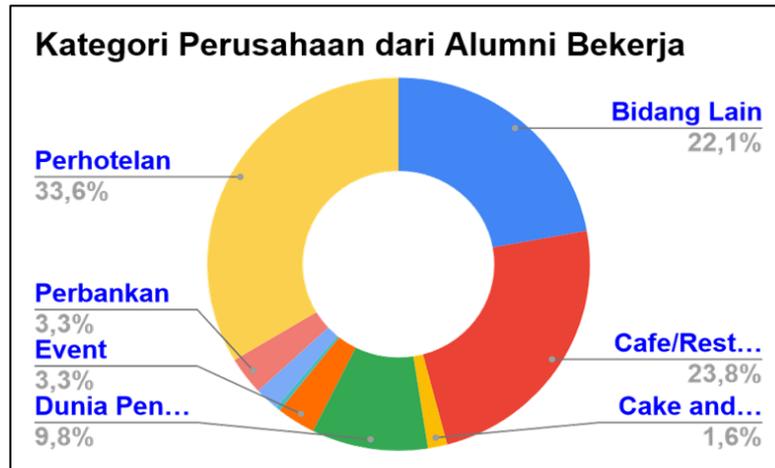
Bagan 1



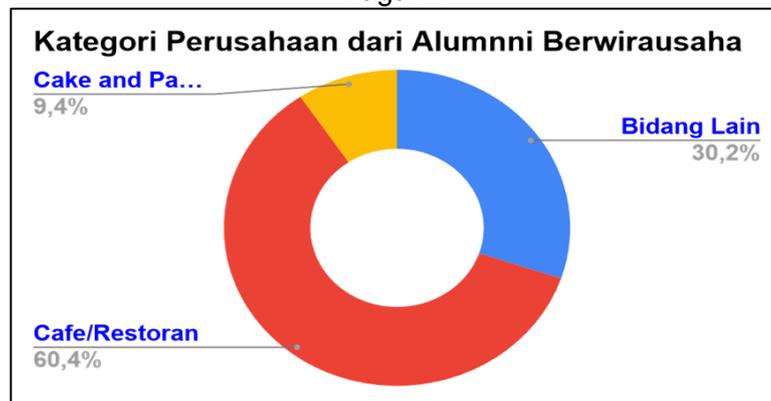
Bagan 2



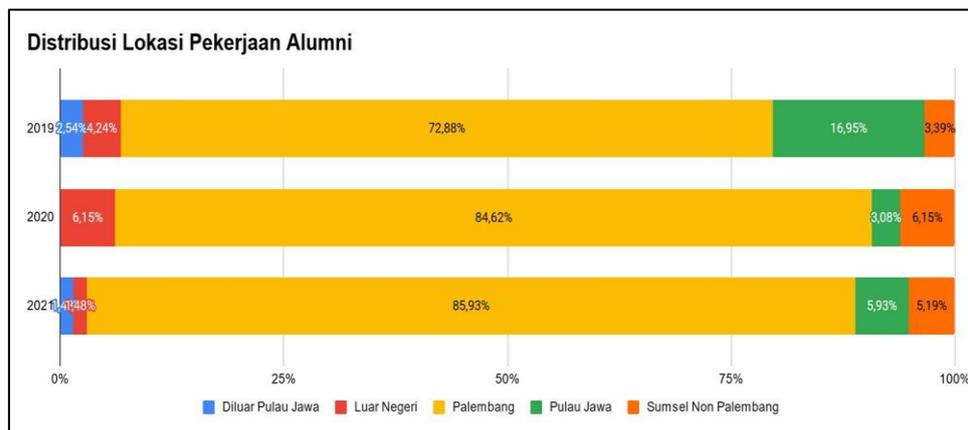
Bagan 3



Bagan 4



Bagan 5



4. Riset Poltekpar Palembang Terhadap Penyelenggaraan Kepariwisata di Provinsi Sumatera Selatan

Poltekpar Palembang dalam perjalanannya mendukung dan melaksanakan penelitian dalam upaya mengembangkan destinasi wisata, adapun beberapa penelitian yang dilakukan dalam mengembangkan destinasi wisata adalah sebagai berikut.

| No. | Judul Penelitian | Tahun |
|-----|---|-------|
| 1. | Analisis pengelolaan sport water event sebsagai destinasi wisata olahraga di Danau Ranau Kabupaten OKU Selatan. | 2019 |
| 2. | Persepsi dan harapan wisatawan terhadap kualitas pelayanan rumah makan di Desa Wisata Terong Kabupaten Belitung. | 2019 |
| 3. | Analisis kompetensi petugas kantor depan terhadap kualitas pelayanan homestay di Desa Wisata Terong Kabupaten Belitung. | 2019 |
| 4. | Strategi pengembangan food preneur khas daerah di Destinasi Wisata Lubuk Linggau. | 2020 |
| 5. | Pengelolaan aliran sungai Lematang sebagai destinasi wisata berbasis tourism sport di Kabupaten Lahat dan Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan. | 2021 |
| 6. | Analisis terhadap program pendampingan pengembangan pelayanan prima di Desa Wisata | 2021 |
| 7. | Pengelolaan area Jakabaring Rowing Lake sebagai potensi destinasi wisata berbasis sport tourism di Jakabaring Sport City Kota Palembang. | 2021 |
| 8. | Analisis potensi dan pengembangan daya tarik wisata Taman Kota Kambang Iwak di Kota Palembang. | 2022 |
| 9. | Evaluasi sumber daya manusia homestay di Desa Wisata Tebat Lereh Meringang Kabupaten Pagar Alam Provinsi Sumatera Selatan. | 2022 |
| 10. | Analisis pola tata ruang di destinasi wisata Plumeria Eco Park Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan. | 2022 |
| 11. | Analisis potensi produk wisata berbasis olahraga sepeda di Desa Wisata Burai Tanjung Batu Kab. Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan. | 2023 |

5. Usulan/masukan Poltekpar Palembang Atas Penyelenggaraan Pendidikan Kepariwisata

Guna memaksimalkan peran Poltekpar Palembang mendukung peningkatan SDM Pariwisata di Provinsi Sumsel memberikan masukan dan harapan di antaranya; (1) dalam meningkatkan SDM pariwisata dibutuhkan dosen – dosen yang kompeten di bidang pariwisata mengingat Poltekpar Palembang adalah perguruan tinggi vokasi yang tidak hanya dituntut untuk memiliki pengetahuan tapi juga dibutuhkan keterampilan dan perilaku yang baik dan (2) Poltekpar Palembang berharap mendapatkan keluasaan memberikan dukungan beasiswa, untuk mendukung dan meningkatkan semangat belajar mahasiswa yang kurang mampu bentuk aturan regulasi, (3) Poltekpar Palembang telah menyampaikan usulan formasi kebutuhan pegawai sesuai analisis jabatan dan analisis beban kerja sesuai dengan perubahan struktur organisasi/nomenklatur yang baru untuk pengadaan tahun 2020-2024 kepada Kemenpan-RB melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan (4) masih dibutuhkan sertifikasi kompetensi untuk dosen vokasi seperti, BNSP, APIEM, AHLEI, dan lain-lain.

6. Usulan/masukan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Poltekpar Palembang Atas Penyusunan RUU Kepariwisata

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan berharap regulasi sektor pariwisata dapat menyesuaikan perkembangan, program/kegiatan dari bidang ekonomi kreatif sehingga menjadikan pilar baru dari empat pilar pada Undang-Undang Kepariwisata yang lama. Kesesuaian antara regulasi sektor kepariwisataan dan ekonomi kreatif memudahkan pemerintah daerah untuk menerbitkan peraturan daerah, kepala daerah dan atau keputusan kepala daerah dalam pengelolaan pariwisata dan ekonomi kreatif secara bersama. Civitas Poltekpar Palembang sendiri mendorong agar RUU Kepariwisata mampu meningkatkan kolaborasi praktisi dan akademisi dalam pengembangan destinasi pariwisata di Indonesia.

B. Masukan dan Aspirasi Pemangku Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan Serta Respon Komisi X DPR RI dan Pemerintah.

1. Pemangku pariwisata Provinsi Sumatera Selatan yang terdiri dari ASITA, ASPI, PHRI, PUTRI, dan Asosiasi Pemandu Gunung memberikan masukan dan harapan sebagai berikut.
 - a. Pelaku pariwisata Provinsi Palembang mengharapkan mendapatkan bimtek/pelatihan bersertifikat, dengan adanya pola perubahan perilaku wisatawan dan kecenderungan lain.
 - b. Mengusulkan agar wisata kesehatan juga mendapatkan perhatian oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dianggap telah siap dari sisi fasilitas dan sumber daya medis untuk melaksanakan 4 kluster jenis usaha jasa wisata kesehatan di antaranya wisata medis, wisata kebugaran, estetika, anti penuaan dan herbal Indonesia, wisata ilmiah kedokteran, serta wisata olahraga kesehatan Indonesia
 - c. Potensi wisata gunung yang terdapat di Provinsi Sumatera Selatan perlu mendapatkan perhatian khusus. Upaya untuk menjadikan gunung (Gunung Dempo) sebagai destinasi wisata unggulan mendapatkan kesulitan karena tidak mendapatkan ijin dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLH).
 - d. Masih terdapat aturan yang tumpang tindih untuk menjadikan keragaman satwa di Provinsi Sumatera Selatan menjadi destinasi wisata, sehingga menyulitkan pembukaan destinasi kebun binatang di Provinsi Sumatera Selatan.
2. Komisi X DPR RI melalui ketua rombongan dr. Sofyan Tan, Anggota Ir. H. Nuroji, Prof. Dr. Ir. Djohar Arifin Husin, Hj. Lefia Hanifa A., S.Si., M.Psi.T, Ratih Megasari Singkaru, M.Sc, dan Ferdiansyah, S.E., M.M. memberikan pandangannya sebagai respon diskusi dalam diskusi bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Poltekpar Palembang dan pemangku pariwisata Provinsi Sumatera Selatan sebagai berikut.
 - a. Mendorong Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan untuk proaktif untuk menginisiasi dan mengorkestrasi promosi pariwisata Sumatera Selatan dengan membuat narasi kuat hubungan sejarah peradaban Muaro Jambi–Sriwijaya–Borubudur sebagai wisata sejarah budaya, menetapkan target negara asal wisatawan mancanegara untuk didatangkan ke Provinsi

- Sumatera Selatan dan melakukan penyesuaian pemenuhan minat wisata dengan merevisi strategi pariwisata yang terdapat di dalam Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah (RIPPDA).
- b. Mendorong agar Kemenparekraf RI dan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menggiatkan pelatihan dan mengedukasi masyarakat sebagai pelaku pariwisata tentang pentingnya menjaga keamanan dan kebersihan untuk kenyamanan wisatawan.
 - c. Mendorong Kemenparekraf RI bersama Poltekpar melakukan kajian membuka prodi-prodi pendidikan kepariwisataan baru yang dibutuhkan sebagai upaya adaptasi berkembangnya jenis, bentuk wisata dan perilaku wisatawan.
 - d. Masih sering terjadinya pembatasan atau larangan pemberian ijin pemanfaatan penggunaan lahan atau kawasan sebagai destinasi wisata harus diatasi dengan menyusun *story telling* dan urgensinya terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar destinasi wisata baru yang akan dibangun.
 - e. Mendorong agar keberadaan Poltekpar Palembang menjadi penyangga kesediaan sumber daya manusia tenaga kepariwisataan untuk wilayah sekitar, seperti Provinsi Lampung, Jambi, Bengkulu dll
 - f. Mendukung adanya akses penerbangan langsung ke Provinsi Palembang khususnya dari negara Malaysia, Singapura dan Tiongkok untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan ke Provinsi Sumatera Selatan.
3. Staf Ahli Menteri Bidang Manajemen Krisis Kemenparekraf RI, Fajar Utomo dalam kesempatannya memberikan respon dalam diskusi Komisi X DPR RI bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Poltekpar Palembang dan pemangku pariwisata yaitu:
- a. Poltekpar Palembang dan Poltekpar lain memiliki program pengabdian masyarakat yang bisa digunakan untuk memberikan pelatihan atau Bimtek untuk masyarakat dan pelaku pariwisata di daerah.
 - b. Mendukung mengangkat sejarah Sriwijaya sebagaimana yang telah diulas diulas oleh peneliti eropa sebagai bagian dari atlantis serta narasi Sriwijaya--Muaro Jambi dan Borubudur harus dijahit sebagai bagian dari sejarah yang bisa dijual bagi wisatawan mancanegara.

III. KESIMPULAN

1. Dukungan Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pendidikan Kepariwisata di Poltekpar Palembang dinilai cukup baik, dukungan dari Pemerintah dalam penyelenggaraan pendidikan kepariwisataan di Poltekpar Palembang mencakup anggaran untuk penyelenggaraan pendidikan serta anggaran operasional, pembangunan fisik dan peralatan, investasi dengan stakeholder yang terkait, serta penyelesaian lahan untuk pembangunan kampus berkelanjutan. Adapun dukungan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pendidikan kepariwisataan di Poltekpar Palembang ialah keterlibatan pemerintah daerah dalam memformulasikan program kegiatan baik pengembangan SDM dan kelembagaan, SDM usaha pariwisata, yang dapat menjadi studi kasus bagi

Poltekpar Palembang sesuai dengan tridharma perguruan yakni pengabdian, penelitian, dan pendidikan. Namun, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan berharap adanya bekerja sama bersama Poltekpar Palembang dalam penyusunan program/kegiatan yang sifatnya pengembangan SDM dan aparatur yang lokusnya di kabupaten/kota agar tidak saling tumpang tindih lokus serta saling melengkapi program/kegiatan dan hal-hal yang tidak diakomodir oleh pemerintah daerah.

2. Secara umum penyelenggaraan pendidikan khususnya dalam hal riset dan peningkatan SDM pariwisata yang dilakukan oleh Poltekpar Palembang tidak ada kendala, hal ini dibuktikan dengan semua dosen dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi salah satunya adalah penelitian. Namun, Poltekpar Palembang mengharapkan beberapa hal guna memaksimalkan peran Poltekpar mendukung peningkatan SDM pariwisata di Provinsi Sumatera Selatan, yaitu (1) dalam meningkatkan SDM pariwisata dibutuhkan dosen–dosen yang kompeten di bidang pariwisata mengingat Poltekpar Palembang adalah perguruan tinggi vokasi yang tidak hanya dituntut untuk memiliki pengetahuan tapi juga dibutuhkan keterampilan di lapangan dan (2) Poltekpar Palembang berharap mendapatkan keluasaan memberikan dukungan beasiswa untuk mendukung dan meningkatkan semangat belajar mahasiswa yang kurang mampu bentuk aturan regulasi.
3. Terkait penyusunan RUU Kepariwisata, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan berharap regulasi sektor pariwisata dapat menyesuaikan perkembangan, program/kegiatan dari bidang ekonomi kreatif sehingga menjadikan pilar baru dari empat pilar pada Undang-Undang Kepariwisata yang lama. Kesesuaian antara regulasi sektor kepariwisataan dan ekonomi kreatif memudahkan pemerintah daerah untuk menerbitkan peraturan daerah, kepala daerah dan atau keputusan kepala daerah dalam pengelolaan pariwisata dan ekonomi kreatif secara bersama. Civitas Poltekpar Palembang sendiri mendorong agar RUU Kepariwisata mampu meningkatkan kolaborasi praktisi dan akademisi dalam pengembangan destinasi pariwisata di Indonesia.
4. Pemangku pariwisata Provinsi Sumatera Selatan yang terdiri dari ASITA, ASPI, PHRI, PUTRI dan Asosiasi Pemandu Gunung memberikan masukan dan harapan sebagai berikut.
 - a. Pelaku pariwisata Provinsi Palembang mengharapkan mendapatkan Bimtek/pelatihan bersertifikat, dengan adanya pola perubahan perilaku wisatawan dan kecenderungan lain.
 - b. Mengusulkan agar wisata kesehatan juga mendapatkan perhatian oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dianggap telah siap dari sisi fasilitas dan sumber daya medis untuk melaksanakan 4 kluster jenis usaha jasa wisata kesehatan di antaranya wisata medis, wisata kebugaran, estetika, anti penuaan dan herbal Indonesia, wisata ilmiah kedokteran, serta wisata olahraga kesehatan Indonesia.
 - c. Potensi wisata gunung yang terdapat di Provinsi Sumatera Selatan perlu mendapatkan perhatian khusus. Upaya untuk menjadikan gunung (Gunung Dempo) sebagai destinasi wisata unggulan mendapatkan

kesulitan karena tidak mendapatkan ijin dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLH).

- d. Masih terdapat aturan yang tumpang tindih untuk menjadikan keragaman satwa di Provinsi Sumatera Selatan menjadi destinasi wisata, sehingga menyulitkan pembukaan destinasi kebun binatang di Provinsi Sumatera Selatan.

IV. REKOMENDASI

- A. Mendorong Kemenparekraf/Baparekraf RI dan pemerintah daerah menjadikan Poltekpar sebagai pusat riset pengembangan wisata dan penyanggah kesediaan sumber daya manusia tenaga kepariwisataan untuk daerah sekitar.
- B. Mendorong Kemenparekraf/Baparekraf RI untuk mendukung pemerintah daerah membuat, mempromosikan dan memperkuat narasi kesejarahan dan budaya daerah sebagai bagian dari produk wisata sejarah yang bisa dijual bagi wisatawan mancanegara.
- C. Mendorong Kemenparekraf/Baparekraf RI dan pemerintah daerah menggiatkan pelatihan dan mengedukasi masyarakat sebagai pelaku pariwisata tentang pentingnya menjaga keamanan dan kebersihan untuk kenyamanan wisatawan.
- D. Mendorong Kemenparekraf/Baparekraf RI dan Kemendikbudristek RI melakukan kajian pembukaan program studi – program studi pendidikan kepariwisataan baru yang dibutuhkan sebagai upaya adaptasi berkembangnya jenis, bentuk wisata dan perilaku wisatawan.
- E. Komisi X DPR RI mendorong Kemenparekraf/Beparekraf RI untuk mendukung pemerintah daerah dalam menyelesaikan permasalahan keterbatasan lahan untuk pembangunan destinasi pariwisata dan usaha jasa pariwisata.
- F. Komisi X DPR RI mendukung adanya akses penerbangan langsung ke Provinsi Palembang khususnya dari negara Malaysia, Singapura, dan Tiongkok untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan ke Provinsi Palembang.
- G. Komisi X DPR RI mendorong Panja RUU Kepariwisata dalam penyusunan RUU Kepariwisata memuat ketentuan yang mampu meningkatkan peran dan kolaborasi praktisi dan akademisi dalam pengembangan riset/penelitian kepariwisataan Indonesia.

V. PENUTUP

Tim Kunjungan Spesifik Pariwisata Komisi X DPR RI akan menindaklanjuti permasalahan, temuan dan masukan yang disampaikan pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan dalam kunjungan ini, baik dalam bentuk rapat maupun menyampaikan rekomendasi secara langsung kepada kementerian terkait. Demikian Laporan Tim Kunjungan Spesifik Bidang Pariwisata Komisi X DPR RI ke Poltekpar Palembang Masa Persidangan V Tahun Sidang 2022--2023 ke Provinsi Sumatera Selatan, agar dapat dijadikan bahan masukan dan memperoleh perhatian serta tanggapan yang sungguh-sungguh dari pemerintah dan semua pihak atau instansi yang terkait dalam menentukan kebijakan selanjutnya.

Jakarta, 24 Juni 2023

**Ketua Tim/
Anggota Komisi X DPR RI,**

Ttd.

**dr. Sofyan Tan
A 137**